



BKPSDM
KABUPATEN
TEMANGGUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kab. Temanggung**

**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

**BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG
2025**

HALAMAN VERIFIKASI

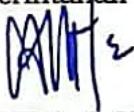
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

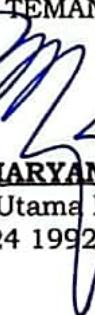

EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator


HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
NIP. 19960707 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "*Meningkatnya kualitas SDM aparatur*", Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp5.305.727.431,00.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 31 Juli 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN VERIFIKASI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I	
PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM.....	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	35
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.....	53
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	55
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (NIHIL).....	64
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	64
2.7 Penghargaan.....	65
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	65
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	66
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	69
4.1. Program dan Kegiatan.....	69
BAB V	
PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Triwulan II Tahun 2025.....	23
Tabel. 2.3	
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD)	
Kabupaten Temanggung.....	36
Tabel 2.4	
Indeks Sistem Merit kabupaten Temanggung tahun 2020- triwulan II 2025.....	41
Tabel 2.5	
Indeks Sistem Merit pemerintah kabupaten Temanggung tahun 2023.....	42
Tabel 2.6	
IP ASN pemerintah kabupaten Temanggung tahun 2019- triwulan II 2025.....	48
Tabel 2.7	
Pencapaian skor dimensi IP ASN triwulan II tahun 2025.....	48
Tabel 2.8	
Capaian Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Triwulan II 2025.....	49
Tabel 2.9	
Capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur Triwulan II 2025.....	50
Tabel 2.10	
Capaian Cakupan Pembinaan SDM Aparatur Triwulan II 2025.....	52
Tabel 2.11	
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026.....	58
Tabel 2.12	
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022-2024.....	64
Tabel 2.13	
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024... 65	
Tabel 3.1.	
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	67
Tabel 4.1.	
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2026.....	70
Tabel 4.2	
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2026.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

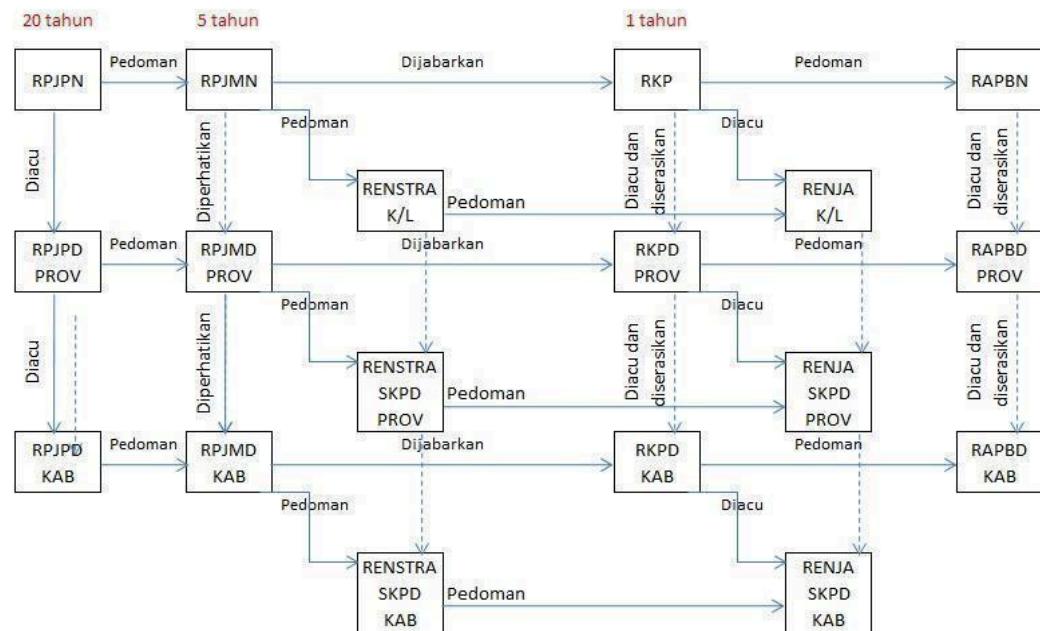
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja BKPSDM Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hirarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.1
Hubungan dan Hirarki Perencanaan Pembangunan**

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 2) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM;
- 4) Data Pokok Pembangunan BKPSDM;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan renstra BKPSDM;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra BKPSDM;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pemberian daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM;

Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan

masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BKPSDM Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra (Perangkat Daerah) 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Tahun 2024

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)				TARGET 2024				REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5,659,559,091			8,073,770,663	5,568,231,928		5,065,517,216				
503	KEPEGAWAIAN				5,145,184,091			6,129,371,663	4,959,231,928		4,503,289,321				
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	4,558,206,591			4,280,601,163	4,525,232,428	100	4,140,344,751				
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3,926,081,531			3,681,416,844	3,926,081,531	100	3,603,507,503				
5030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	3,926,081,531			3,681,416,844	3,926,081,531	36	3,603,507,503	100	91.78		
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	111,435,956			135,593,000	137,076,340	100	89,315,400				

5030120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3,098,500		12	3,599,500	3,599,500	12	3,599,500	100	100
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	17,548,000		12	19,999,500	19,999,000	12	19,230,100	100	96.16
5030120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,500,000		12	20,000,000	20,000,000	12	16,235,300	100	81.18
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	29,994,456		12	41,994,000	41,993,840	12	16,578,000	100	39.48
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	44,295,000		12	50,000,000	51,484,000	12	33,672,500	100	65.40
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	303,239,260		100	304,596,300	303,094,397	100	282,552,478		
5030120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2,500,000		12	5,000,000	3,500,000	12	2,252,890	100	64.37
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43,640,460		12	39,989,400	39,989,400	12	28,941,303	100	72.37

5030120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	257,098,800		12	259,606,900	259,604,997	12	251,358,285	100	96.82
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	%	100	217,449,844		100	158,995,019	158,980,160	100	164,969,370		
5030120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	96,251,198		15	80,000,000	79,996,200	15	67,587,420	100	84.49
5030120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	126	1,797,660		126	1,997,500	1,997,400	126	1,550,000	100	77.60
5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	256	24,991,200		256	25,000,000	24,991,200	256	20,133,000	100	80.56
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	92,412,786		2	49,999,999	49,999,000	2	74,515,950	100	100
5030120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	1,997,000		11	1,997,520	1,996,360	11	1,183,000	100	59.26

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1											100	79.25	
												Predikat	Sangat Tinggi
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				586,977,500			1,848,770,500	433,999,500		362,944,570		
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	42. 57			41. 39			100		100	
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	87. 67			86. 5			51		58.3 8	
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	3	334,727,500		3	306,121,000	165,000,000	3	130,586,100		
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	317,227,500		1	202,765,000	140,000,000	1	110,130,100	100	78.66
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	400	10,000,000		400	28,252,000	10,000,000	406	7,310,500	100	73.11
5030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	7,500,000		3	75,104,000	15,000,000	8	13,145,500	100	87.64

50302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	2	188,500,000		2	214,408,000	70,000,000	2	56,441,720		
5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	750	10,000,000		750	39,408,000	10,000,000	1,417	8,271,300	100	82.71
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Dokumen	6	178,500,000		6	175,000,000	60,000,000	9	48,170,420	100	80.28
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen	3	28,750,000		3	1,216,571,500	159,999,500	3	151,952,350		
5030220302	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	18,750,000		1	1,171,000,000	150,000,000	1	144,974,100	100	96.65
5030220304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	12	-		12	20,000,000	-		-		
5030220314	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	400	10,000,000		400	25,571,500	10,000,000	2,436	6,978,250	100	69.78
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	35,000,000		4	111,670,000	39,000,000	4	23,964,400		
5030220401	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	15,000,000		1	31,181,600	10,000,000	1	127,400	100	1.27

5030220403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	10,000,000		1	15,000,000	10,000,000	1	4,966,000	100	49.66
5030220407	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	300	10,000,000		300	56,488,400	10,000,000	763	7,759,500	100	77.60
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	-		1	9,000,000	9,000,000	10	11,111,500	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1													100.00
													Predikat Sangat Tinggi
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				514,375,000			1,944,399,000	609,000,000		562,227,895		
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				514,375,000			1,944,399,000	609,000,000		562,227,895		
		Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	97.02			96.18			82.75		86.04	
50402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan	1	45,000,000		1	115,026,000	54,000,000	1	46,783,250		

5040220103	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	240	45,000,000			240	115,026,000	54,000,000	3,900	46,783,250	100	86.64
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan	1	469,375,000			1	1,829,373,000	555,000,000	1	515,444,645		
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	469,375,000			5	1,829,373,000	555,000,000	5	515,444,645	100	92.87
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1												100.00	89.75
	Predikat												Sangat Tinggi	
	JUMLAH								8,073,770,663	5,568,231,928		5,065,517,216		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												100.00	90.97

PREDIKAT	SANGAT TINGGI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	81.4 7
PREDIKAT	TINGGI

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Triwulan II Tahun 2025

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5,145,184,091			6,177,541,150	6,460,862,124.62		2,559,758,855			
503	KEPEGAWAIAN			5,145,184,091			5,571,185,400	5,760,862,124.62		2,507,936,855			
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	4,558,206,591		100	5,076,456,300	5,130,392,124.62	0	2,457,632,355		

50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3,926,081,531		100	4,483,754,624	4,483,754,624.00	0	2,201,825,992		
5030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	3,926,081,531		35	4,483,754,624	4,483,754,624.00	44	2,201,825,992	25	49.11
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	111,435,956		100	88,195,340	130,809,340.00		7,065,297		
5030120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3,098,500		12	2,169,000	3,099,500.00	6		50	0
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	17,548,000		12	14,034,000	19,499,000.00	6		50	0.00
5030120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,500,000		12	11,400,000	19,000,000.00	6		50	0.00
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	29,994,456		12	35,988,840	39,993,840.00	6	175,000	50	0.44
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	44,295,000		12	24,603,500	49,217,000.00	6	6,890,297	50	14.00

50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	303,239,260		100	307,174,817	309,589,400.20		139,101,866		
5030120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2,500,000		12	3,500,000	3,500,000.00	6	448,300	50	12.81
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43,640,460		12	48,489,400	48,489,400.00	6	14,988,012	50	30.91
5030120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	257,098,800		12	255,185,417	257,600,000.20	6	123,665,554	50	48.01
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	%	100	217,449,844		100	197,331,519	206,238,760.42		109,639,200		
5030120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	96,251,198		19	87,563,197	96,251,198.00		25,952,000	0	26.96
5030120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	126	1,797,660		353	1,797,660	1,997,400.00		0	0.00	

5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	256	24,991,200		408	24,991,200	24,991,200.00		3,490,000	0	13.96
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	92,412,786		2	79,998,999	79,998,999.42	1	79,497,200	50	100
5030120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	1,997,000		45	2,980,463	2,999,963.00		700,000	0	23.33
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1													
Predikat													
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				586,977,500			494,729,100.00	630,470,000.00		50,304,500		
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	42.5 7			42. 36			48.3 3		100.0 0	
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	87.6 7			86. 58			49.4 0		57.05	
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan ASN	Dokumen	3	334,727,500		3	357,542,400.00	452,970,000.00		5,993,500		

		Jumlah PNS yang Mendapatkan Layanan Pensiun	Orang				353						
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	Dokumen				5						
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	317,227,500		1	344,520,000.00	432,970,000.00	1	5,618,500	100	1.30
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	400	10,000,000		353	5,902,000.00	10,000,000.00	169		48	0.00
5030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	7,500,000		1	7,120,400.00	10,000,000.00	1	375,000	100	3.75
50302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	2	188,500,000		4	108,134,000.00	110,000,000.00		42,811,000		
		Jumlah ASN yang dipromosi	Orang				34						
5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	750	10,000,000		800	7,781,000.00	10,000,000.00	687	2,426,000	86	24.26
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Dokumen	6	178,500,000		4	100,353,000.00	100,000,000.00	3	40,385,000	75	40.39

50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang di assessment	Orang	3	28,750,000		80	7,324,000.00	35,000,000.00	0	500,000		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Orang				800			591			
5030220302	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	18,750,000		1	0.00	25,000,000.00	0	0	0.00	
5030220304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	12	-			0.00	0.00				
5030220314	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	400	10,000,000		800	7,324,000.00	10,000,000.00	591	500,000	74	5.00
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kebijakan	4	35,000,000		1	21,728,700.00	32,500,000.00	0	1,000,000		
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Uji Kesehatan	Orang				4			4			
		Jumlah kegiatan pembinaan disiplin yang dilaksanakan	Kegiatan				5			2			
		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	Dokumen										

		(Jumlah SK/Jumlah pelanggaran)											
5030220401	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	15,000,000		1	7,957,700.00	15,000,000.00	0		0	0.00
5030220403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	10,000,000		5	8,726,800.00	10,000,000.00	4	330,000	80	3.30
5030220407	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	300	10,000,000		50	5,044,200.00	7,500,000.00	25	670,000	50	8.93
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	-			0.00	0.00	13			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1												61.26	8.69
												Predikat	Rendah
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				514,375,000			606,355,750.00	700,000,000.00		51,822,000		
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				514,375,000			606,355,750.00	700,000,000.00		51,822,000		
		Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	97.02			97			66.64		68.70	
50402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Laporan	1	45,000,000		4000	39,016,200.00	50,000,000.00	750	15,835,000		

5040220103	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	240	45,000,000		4000	39,016,200.00	50,000,000.00	750	15,835,000	19	31.67	
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan	1	469,375,000		25	567,339,550.00	650,000,000.00	5	35,987,000			
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	469,375,000		5	567,339,550.00	650,000,000.00	2	35,987,000	40	5.54	
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1	29.38	18.60	
											Predikat	Sangat Rendah		
				JUMLAH							6,177,541,150	6,460,862,124.62		2,559,758,855
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	41.52	39.62	

PREDIKAT	SANGAT RENDAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	75.25
PREDIKAT	SANGAT TINGGI

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN
 - b. Indeks Merit System
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase penyusunan formasi pegawai
 - b. Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu
 - c. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu
 - d. Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional
 - e. Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas
 - f. Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian
 - g. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan
 - h. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - k. Pemeliharaan Mebel
 - l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - o. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - p. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - q. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - r. Pengelolaan Promosi ASN
 - s. Pengelolaan *Assessment Center*
 - t. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - u. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - b. Pembinaan Disiplin ASN
 - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
- a. Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur

- b. Cakupan Pembinaan SDM Aparatur
- 6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN yang ditargetkan 1000 orang ASN namun capaian kinerjanya hanya 693 orang ASN atau 69,3 % adalah karena dari target tersebut sebagian adalah dari ASN Jabatan Fungsional yang persyaratan untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi diantaranya angka kredit yang mencukupi namun belum dapat terpenuhi sehingga belum bisa untuk diusulkan kenaikan pangkatnya. Tindak lanjut ke depannya BKPSDM akan mengadakan Sosialisasi, Bimtek dan Workshop bagi Jabatan Fungsional agar dapat mengembangkan kompetensi dan keahliannya yang dapat menunjang dalam memperoleh nilai angka kredit yang mencukupi agar bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa BKPSDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **94,21%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian;
- Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan II Tahun 2025 (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Indeks Merit System	Angka	0,482	0,5	0,55	0,61	0,62	0,62		100	Sangat Tinggi				
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,09	61,75	61,8	61,85	78,5	79		100	Sangat Tinggi				
3	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	Persentase	40,29	41,39	42,36	42,57	123,60	49,21		100	Sangat Tinggi				
4	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	Persentase	86,41	86,5	86,58	87,67	50,50	72,51		83,75		Tinggi			
5	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	Persentase	96,17	96,18	97	97,02	82,75	66,61		68,67			Sedang		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 3 terdiri dari:
 - a. Indeks Merit System.
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit, menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan :
 1. Aspek Perencanaan Kebutuhan : Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan; Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan
 2. Aspek Pengadaan: KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN; Laporan evaluasi latsar
 3. Aspek Pengembangan Karir: Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen; Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi; Laporan diklat pegawai terbaru; KAK coaching, mentoring dan magang; Dokumentasi
 4. Aspek Promosi dan Mutasi: Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka
 5. Aspek Manajemen Kinerja: Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai; Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai
 6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan
 7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum
 8. Aspek Sistem Informasi: Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta; Dokumen integrasi SIMPEG; serta

tersedianya dan telah dilakukannya pengembangan aplikasi yang mendukung sistem merit, yaitu aplikasi e-kinerja BKN dan aplikasi PKSP 360 derajat

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 1. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan kesenjangan (gap) kompetensi dan kualifikasi.
 2. Belum memiliki rencana suksesi by system untuk seluruh pegawai
 3. Belum menyusun kesenjangan (gap) kinerja.
 4. Penilaian sistem merit masih diprioritaskan untuk instansi yang belum mendapatkan nilai dengan kategori baik, sehingga pada saat ini belum dapat menilaikan sistem merit
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 1. Menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen
 2. Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin.
 3. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja PKSP 360° untuk aspek manajemen kinerja.

b. Indeks Profesionalitas ASN

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 1. Update data kepegawaian yang dilakukan oleh BKPSDM lewat aplikasi My SAPK
 2. Update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi SIMPEG
 3. Keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri
 4. Semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
Belum semua pegawai melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi

penilaian dalam IP ASN.

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.

c. Cakupan Pembinaan SDM Aparatur

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal

2. Capaian indikator dengan status Tinggi ada 2 terdiri dari:

a. Cakupan Pengembangan SDM Aparatur

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 1. Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, dan adanya penyederhanaan birokrasi
 2. Tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 1. Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural
 2. Keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat.

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSPDM Kemendagri

b. Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah

1. Anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS
2. Tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu.

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah

Kurangnya pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS)

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku ke pengelola kepegawaian maupun ASN.

3. Capaian Indikator dengan status sedang ada 1, yaitu Cakupan Pembinaan SDM Aparatur.

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya

kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

dilakukan sosialisasi kepada unit Perangkat Daerah terkecil secara non formal.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada BKPSDM terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kepegawaian dan Data Pokok Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Kepegawaian dan Data Pokok Pendidikan dan Pelatihan

a. Indeks Sistem Merit

Penilaian Sistem Merit dilakukan setiap tahun, hasil penilaian Sistem Merit secara mandiri dan penilaian yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dari tahun 2020 hingga triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Indeks Sistem Merit kabupaten Temanggung
tahun 2020- triwulan II 2025

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penilaian Sistem Merit	218	113	200	258	258	258
2.	Indeks Sistem Merit	0,52	0,259	0,482	0,62	0,62	0,62

Sumber : Download Aplikasi sipinter

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian atau skor indeks sistem merit pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skornya dibandingkan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri lewat aplikasi “sipinter”, namun penilaian mandiri yang kita laksanakan belum mendapatkan verifikasi atau penilaian dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020 oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks Sistem Merit di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian sistem merit yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skor sistem merit tahun 2021 karena dokumen pendukung atau pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021. Penilaian indeks Sistem Merit oleh KASN terakhir dilakukan pada akhir tahun 2022.

Pengukuran skor Sistem Merit di kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS pemerintah kabupaten Temanggung.

Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks Sistem Merit.

Secara rinci hasil perolehan atau skor indeks Sistem Merit tahun 2023 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Indeks Sistem Merit pemerintah kabupaten Temanggung tahun 2023

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAATINI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;	2,5	10	10
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	7,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	10
	SUB-TOTAL I				40	37,5
II	PENGADAAN (10%)	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	8
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	8

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;				
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara objektif dan transparan;	2	8	8
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;	2	8	8
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB-TOTAL II				40	40
III	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	10
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	20	10
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4. Ketersediaan rencana sukses yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	belum ada rencana sukses yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	7,5	7,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		kesenjangan kinerja;				
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2,5	5
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5	7,5	5
		SUB-TOTAL III			80	45
IV	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana sukses;	belum ada kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana sukses;	2,5	10	7,5
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	7,5
		SUB-TOTAL IV			40	30
V.	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	20

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	10	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	2,5	5	5
		SUB-TOTAL V			60	50
VI	PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	10	10
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan nonfinansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	10	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	10	7,5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	2,5	7,5	7,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
	SUB-TOTAL VI				37,5	27,5
VII	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	8	4
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktivitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	8
	SUB-TOTAL VII				16	12
VIII	SISTEM INFORMASI (6%)	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	4	3
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan e-office;	1	4	3
		4. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4
	SUB-TOTAL VIII				20	16
	TOTAL				333,5	258
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Penilaian Indeks Sistem Merit sampai dengan triwulan II 2025, merupakan hasil penilaian yang sudah ditetapkan oleh KASN pada Tahun 2023 yaitu sebesar 258 dengan nilai indeks 0,62, kategori Baik. Hasil tersebut melebihi target capaian tahun 2024 yaitu sebesar 0,50. Hal-hal yang mendorong tercapainya target tersebut adalah dengan menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan serta melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan :
 - a. Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan
 - b. Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan
2. Aspek Pengadaan :
 - a. KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN
 - b. Laporan evaluasi latsar
3. Aspek Pengembangan Karir :
 - a. Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen
 - b. Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi
 - c. Laporan diklat pegawai terbaru
 - d. KAK coaching, mentoring dan magang
 - e. Dokumentasi coaching mentoring
4. Aspek Promosi dan Mutasi :
 - a. Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka
5. Aspek Manajemen Kinerja :
 - a. Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai
 - b. Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai
6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin :
 - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - b. Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan :
 - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - b. Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum
8. Aspek Sistem Informasi :

- a. Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta
- b. Dokumen integrasi SIMPEG

b. Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian secara terperinci nilai indeks IP ASN dengan penghitungan mandiri dan yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2019 sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
IP ASN pemerintah kabupaten Temanggung
tahun 2019- triwulan II 2025

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kualifikasi	10,34	10,82	11,907	12,39	20,98	20,72	20,63
2.	Kompetensi	11,48	9,15	9,343	12,73	13,6	27,69	28,65
3.	Kinerja	25,07	25,09	25	23,01	24,97	25,09	24,72
4.	Disiplin	4,95	4,97	4,997	5	5	5	5
TOTAL		46	51,84	50,03	51,247	64,55	78,5	79

Tabel 2.7
Pencapaian skor dimensi IP ASN triwulan II tahun 2025

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	20,63	82,52%
Kompetensi	40% (0,40)	28,65	71,63%
Kinerja	30% (0,30)	24,72	82,40%
Disiplin	5% (0,05)	5	100,00%

Berdasarkan tabel pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 28,65%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan

anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini akan berpengaruh terhadap menurunnya capaian IP ASN di tahun mendatang.

Capaian IP ASN triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 61,9 lebih tinggi 0,15 dari target yang direncanakan yaitu 61,75. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN.

c. Cakupan Pengembangan SDM Aparatur

Tabel 2.8

Capaian Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Triwulan II 2025

No .	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun			
					2022	2023	2024	2025
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	((Jumlah Formasi ASN yang disetujui Kemenpan / Jumlah Formasi ASN yang diusulkan x 100%) + (Jumlah pejabat struktural yang ada / Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada x 100%) + (Jumlah PNS mengikuti Diklat Struktural / Jumlah Pejabat Struktural x 100%) + (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional / Jumlah ASN fungsional x 100%) + (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis / Jumlah ASN Selain Struktural & Fungsional x 100%)) / 5	38,11	40,29	123,60	48,33
				Jumlah Formasi ASN yang disetujui Kemenpan	657	350	453	453
				Jumlah Formasi ASN yang diusulkan	662	400	453	453
				Jumlah pejabat struktural yang ada	470	470	457	452

Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada	560	560	539	539
Jumlah PNS mengikuti Diklat Struktural	3	7	142	1
Jumlah Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat	329	326	335	309
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	160	160	28	10
Jumlah ASN fungsional	3892	3892	6630	6584
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis	50	500	3900	556
Jumlah ASN Selain Struktural & Fungsional	2106	2106	999	970
Jumlah ASN	8060	8060	8086	-
Jumlah Pensiun ASN	444	400	406	-

Berdasarkan tabel 2.8 nilai capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu Tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor pendorong yang meliputi Anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS dan Tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu, akan tetapi ada juga faktor penghambatnya, yaitu kurangnya pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak diketahui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS). Upaya yang dilakukan untuk mencapai Target Kinerja Tahun 2024 adalah dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku ke pengelola kepegawaian maupun ASN.

d. Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur

Tabel 2.9

Capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur
Triwulan II 2025

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun			
					2022	2023	2024	2025
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	% Jumlah ASN Pelaksana yang ada Jumlah kebutuhan ASN Pelaksana yang seharusnya tertata Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN Jumlah usulan kenaikan pangkat ke BKN	((Jumlah ASN Pelaksana yang ada / Jumlah kebutuhan ASN Pelaksana yang seharusnya tertata x 100%) + (Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN / Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN x 100%)) / 2	86,32	86,41	50,50	49,40
				Jumlah ASN Pelaksana yang ada	2106	2111	999	960
				Jumlah kebutuhan ASN Pelaksana yang seharusnya tertata	2899	2899	5583	5583
				Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN	846	840	1417	337
				Jumlah usulan kenaikan pangkat ke BKN	846	840	1705	413

Berdasarkan tabel 2.9 nilai capaian indikator Cakupan Pengembangan SDM Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu tinggi, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut meliputi Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong dan adanya penyederhanaan birokrasi, serta tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat. Faktor penghambat yang meliputi Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural dan Keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah

untuk pembiayaan diklat. Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 yaitu melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov. DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSPDM Kemendagri.

e. Cakupan Pembinaan SDM Aparatur

Tabel 2.10

Capaian Cakupan Pembinaan SDM Aparatur Triwulan II 2025

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	% ((Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin / Jumlah ASN x 100%) + (Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN / Jumlah ASN yang wajib melaporkan LHKPN x 100%) + (Jumlah ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana) / Jumlah ASN yang seharusnya mendapatkan penghargaan (satya lencana) x 100%)) / 3 Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin Jumlah ASN Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN Jumlah ASN yang wajib melaporkan LHKPN Jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana) Jumlah ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana)		96,17	96,17	82,75	66,64	
					8055	8056	8076	8000	
					8060	8060	8086	8006	
					470	470	509	492	
					470	470	509	492	
					124	124	60	0	
					140	140	124	288	

Berdasarkan tabel 2.10 nilai capaian indikator Cakupan Pembinaan SDM Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut yaitu meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian. Faktor penghambat yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Target Kinerja Tahun 2024 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM dari 5 indikator terdapat 5 indikator yang telah mencapai target 100%
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, antara lain :
 - a) Bidang Kepegawaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan I Tahun 2024 masih rendah yaitu di angka 61,9 atau jika dalam nilai prestasi kerja masih pada kategori rendah (61-70). Hal ini disebabkan karena belum terkoneksi data kepegawaian dengan perhitungan indeks, dan belum semua pegawai melakukan update dan upload data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan salah satu aspek dalam dimensi penilaian IP ASN. Pencapaian skor paling rendah ada pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 32%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi

diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian IP ASN.

b) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Menurut UU No 20 Tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Di dalam upayanya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, baik dalam bentuk pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, fungsional, serta teknis maupun penyelenggaraan bimbingan teknis. Sebagai hasilnya, capaian IP ASN Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 64,54 dari target yang

ditetapkan sebesar 50,09. Meskipun capaian IP ASN tersebut telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan dan pelatihan belum sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menganggarkan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja. Sementara saat ini alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar 0,017 % dari total belanja. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, telah dilakukan berbagai strategi untuk mencapai target dimaksud dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional secara mandiri serta koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara pelatihan agar diperoleh informasi pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional yang tidak berbayar salah satunya adalah MOOC (*Massive Open Online Course*) yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan upaya mengatasinya sebagai berikut:

- Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.
- Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.8.004.249,00.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp10.008.800,00 dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp130.002.200,00.
2. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebesar Rp.1.046.000.000,00; Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp2.500.000,00 dan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp38.750.000,00 untuk Kebutuhan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dalam mendukung peningkatan *Merit System* dan IP ASN.
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebesar Rp2.500.000,00 dan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN untuk Selter JPT Eselon II.a/II.b untuk 2 jabatan kosong sebesar Rp275.000.000,00.
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan Pengelolaan *Assessment Center* sebesar Rp.662.990.000,00 dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebesar Rp2.500.375,00.
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar Rp9.800.000,00 untuk Kebutuhan

biaya rapat penyusunan perbup TPP; Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp5.500.000,00 untuk Kebutuhan medical check up ASN, perjalanan dinas dalam kota untuk monitoring cuti sakit, honor narasumber untuk kegiatan talkshow; Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp5.500.000,00 untuk Kebutuhan honor narasumber, leaflet disiplin ASN; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp750.000,00 untuk Kebutuhan minimal pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin.

3. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Pengembangan SDM Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp.3.306.710.000,00 untuk kebutuhan diklat dasar JF, Diklatpim, Latsar dan MOOC Orientasi PPPK.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	KEPEGAWAIAN					
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ bulan	3.926.081.531
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	12	Paket	3.099.500
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	17.549.100
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	16.500.000
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temang gung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	29.994.456

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	KEPEGAWAIAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ bulan	3.926.081.531	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	3,098,500	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	17,548,000	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	16,500,000	
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temang gung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	29,994,456	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	44.295.300		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	44,295,000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temang gung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temang gung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2,500,000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	43.640.460		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	43,640,460	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	257.098.800		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	257,098,800	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda						4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temang gung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	96.251.198		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temang gung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	96,251,198	
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temang gung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.797.660		- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temang gung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1,797,660	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	24.991.200
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	67.517.876
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.997.000
B.	Program Kepegawaian Daerah					
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian					
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	317.227.500
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	Dokumen	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	24,991,200	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	92,412,786	Rehabilitasi gedung kantor
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1,997,000	
B.	Program Kepegawaian Daerah						
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	432.970.000	Kebutuhan pengadaan CASN 460 formasi (CPNS: 260 dan PPPK: 200)
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	Dokumen	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	7.500.000		- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	7,500,000	
2.	Mutasi dan Promosi ASN						2.	Mutasi dan Promosi ASN						
	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	Dokumen	10.000.000		- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	Dokumen	10.000.000	
	- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	Dokumen	75.000.000		- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	Dokumen	103.500.000	7 Jabatan JPTP tanpa Assessment
3.	Pengembangan Kompetensi ASN						3.	Pengembangan Kompetensi ASN						
	- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen pengelolaan assessment	1	Dokumen	18.750.000		- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen pengelolaan assessment	1	Dokumen	402.500.000	Anggaran PCAP bagi JPTP Es.IIb, QAP bagi Jabatan Administrator dan Pengawas, CAT bagi JF dan Pelaksana
	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	Orang	0		- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	Orang	0	
	- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan	400	Orang	10.000.000		- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan	400	Orang	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Karir			
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
	- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	Dokumen	15.000.000
	-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	10.000.000
	-Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Orang	10.000.000
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	0
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum					
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4100	Orang	45.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Karir				
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	Dokumen	15.000.000	
	-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	10.000.000	
	-Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Orang	10.000.000	
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	0	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum						
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4100	Orang	200.250.000	Anggaran Mandatory 0,16% dari Total APBD, mendukung

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan							Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan						capaian IP ASN (Workshop, Bimtek, Diklat PBJ dan HCDP)
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Laporan	469.375.000		- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Laporan	609.375.000	Anggaran Mandatory 0,16% dari Total APBD, mendukung capaian IP ASN (UKPPI, Diklatpim Nasional, Administrator dan Pengawas, Latsar CPNS, Diklat Kepamongprajaan, Sertifikasi Damkar)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (NIHIL)

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/a/Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Dataku Tanggung Jawabku	ASN	--	Latar belakangnya, masih banyak ASN yang kurang, bahkan tidak peduli dengan datanya sendiri. ASN berpangku tangan dan menyerahkan semua tanggung jawab data kepegawaian kepada pengelola kepegawaian. Akibatnya, jika data kepegawaian tidak update dan tidak lengkap maka: <ul style="list-style-type: none">- Menghambat proses kenaikan pangkat- Menghambat proses pensiun- Menjadi faktor kesalahan dalam pengambilan kebijakan- Menghambat proses ijin belajar- Menghambat penyesuaian gelar pendidikan, dll	Meningkatnya kepedulian ASN terhadap pentingnya data kepegawaian	Inovasi ini dalam rangka mengoptimalkan Aplikasi SIMPEG BKPSDM dan layanan kepegawaian yang semakin <i>go green/paperless</i> .	BKPSDM / 2022
2	PKSP 360 (Peka Teman)	ASN		Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360 derajat (PKSP 360°) adalah suatu sistem penilaian sikap dan perilaku dalam suatu organisasi yang meliputi penilaian dari atasan, bawahan, dan rekan kerja untuk memberikan umpan balik yang komprehensif tentang kinerja, sikap dan perilaku seorang pegawai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan holistik mengenai kinerja, sikap dan perilaku seorang pegawai, serta memberikan informasi yang lebih detail untuk pengembangan diri.	Tersedianya aplikasi PKSP 360 (Peka Teman) yang digunakan untuk melakukan penilaian secara online, mandiri, tertutup dan rahasia	Mendapatkan hasil penilaian kinerja yang objektif sebagai bahan pemetaan talenta. Sehingga sistem merit dapat diterapkan secara maksimal dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN .	DINKOMI NFO - BKPSDM / 2024
3	E-KENAIKAN PANGKAT	PNS		Selama ini proses pengajuan kenaikan pangkat bagi PNS masih dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Untuk meningkatkan layanan dalam pengajuan kenaikan pangkat, dibuatlah aplikasi E-KP yang akan mempercepat proses	Tersedianya aplikasi E-Kenaikan Pangkat (E-KP) yang mudah digunakan karena sudah terintegrasi dengan SIMPEG dan	Proses pengajuan kenaikan pangkat PNS akan lebih mudah, cepat dan efisien (paperless).	DINKOMI NFO - BKPSDM / 2024

				pengajuan KP secara online yang dapat dilakukan dimana saja.	dapat diakses di mana saja.		
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Anugerah Meritokrasi Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2023 dengan kategori Baik atau kategori III (Nilai 258, Indeks 0,62)	KASN	Nasional	BKPSDM
2.	Pengangkatan Jabatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak dengan Persentase Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Provinsi Jawa Tengah	BKPSDM
3.	Penghargaan dari Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta atas prestasi dalam Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Persentase Terbanyak Tahun 2024	Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta	BKPSDM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan BKPSDM yang dirumuskan dalam Renstra BKPSDM 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualitas SDM Aparatur” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja BKPSDM.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis sistem merit			Indeks Merit System	Angka	0,69	0,81
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik			1. IKM Perangkat Daerah	Angka	82,00	82,25
			2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74	75,5
Terwujudnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80,5	81,15
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100,00	100,00
			Persentase keterisian jabatan	%	85,34	86,27
			Persentase Kebutuhan ASN	%	100,00	100,00
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,18	99,55
			Persentase kedisiplinan ASN	%	99,43	99,80
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	%	24,73	30,92

Sumber : Renstra BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penambahan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2026		RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026		(+ / -)		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	5.016.791.581,00	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	5.016.791.581,00	0,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.533.314.081,00	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.533.314.081,00	0,00
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.081.531,00	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.081.531,00	0,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.081.531,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.081.531,00	0,00
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.438.356,00	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.438.356,00	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.099.500,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.099.500,00	0,00
	Penyediaan Logistik Kantor	17.549.100,00		Penyediaan Logistik Kantor	17.549.100,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.500.000,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.500.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.994.456,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.994.456,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.295.300,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.295.300,00	0,00
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303.239.260,00	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303.239.260,00	0,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.640.460,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.640.460,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.098.800,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.098.800,00	0,00
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.554.934,00	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.554.934,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	96.251.198,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	96.251.198,00	0,00
	Pemeliharaan Mebel	1.797.660,00		Pemeliharaan Mebel	1.797.660,00	0,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.991.200,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.517.876,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangungan lainnya	1.997.000,00
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	483.477.500,00
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	334.727.500,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	317.227.500,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.500.000,00
b.	Mutasi dan Promosi ASN	85.000.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN	75.000.000,00
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	28.750.000,00
	Pengelolaan Assessment Center	18.750.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000,00
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	10.000.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	514.375.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	514.375.000,00
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	45.000.000,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.991.200,00	0,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.517.876,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangungan lainnya	1.997.000,00	0,00
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	483.477.500,00	0,00
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	334.727.500,00	0,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	317.227.500,00	0,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.500.000,00	0,00
b.	Mutasi dan Promosi ASN	85.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Promosi ASN	75.000.000,00	0,00
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	28.750.000,00	0,00
	Pengelolaan Assessment Center	18.750.000,00	0,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0,00	0,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000,00	0,00
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00	0,00
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,00	0,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000,00	0,00
	Pembinaan Disiplin ASN	10.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0,00	0,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	514.375.000,00	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	514.375.000,00	0,00
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	45.000.000,00	0,00

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	45.000.000,00		
2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	469.375.000,00		0,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	469.375.000,00		0,00
	JUMLAH	5.531.166.581,00		0,00

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung
Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kel om pok Sas ara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nas ion al	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							5.531.166.581,00							1.950.722.209.068,20		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.531.166.581,00							1.950.722.209.068,20		
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.016.791.581,00							5.402.209.068,20		
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-			100 %	4.533.314.081,00						-		4.318.829.068,20		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.926.081.531,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-		3.926.081.531,00		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	111.438.356,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	130.510.340,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	3.099.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		3.099.500,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	17.549.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		19.200.000,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		19.000.000,00	BKPSDM
	5.03.01. 2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	29.994.456,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		39.993.840,00	BKPSDM
	5.03.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		0				12 0	44.295.300,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		49.217.000,00	BKPSDM

	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	-			100 %	303.239.260,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	57.001.400,20	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				0 0	2.500.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		3.500.000,00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.640.460,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		48.489.400,00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	257.098.800,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		5.012.000,20	BKPSDM
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	192.554.934,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	205.235.797,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	96.251.198,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		96.251.198,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													

		Jumlah Mebel yang Dipelihara				126 Unit	1.797.660,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.997.400,00	BKPSDM
5.03.01.	2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				256 Unit	24.991.200,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		24.991.200,00	BKPSDM
5.03.01.	2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	67.517.876,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		79.998.999,00	BKPSDM
5.03.01.	2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	1.997.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.997.000,00	BKPSDM
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kebutuhan ASN	-		100 %	483.477.500,00						-	1.083.380.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan ASN Jumlah PNS yang Mendapatkan Layanan Pensiun Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	-		1 Dokumen 400 Orang 5 Unit	334.727.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	492.470.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	317.227.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		432.970.000,00	BKPSDM

5.03.02. 2.01.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				400 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		19.500.000,00	BKPSDM
5.03.02. 2.01.001 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	7.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	BKPSDM
5.03.02. 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosi Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	-			30 Orang 4 Dokumen	85.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	182.000.000,00	
5.03.02. 2.02.000 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		22.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		160.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang di assessment Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	-			200 Orang 600 Orang	28.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	317.500.000,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														

		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Doku men	18.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		300.000.000,00	BKPSD M
5.03.02. 2.03.000 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					12 Orang	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	BKPSD M
5.03.02. 2.03.001 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir					600 Orang	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		17.500.000,00	BKPSD M

	5.03.02. 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terfasilitasi Uji Kesehatan Jumlah Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan disiplin yang dilaksanakan Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin (Jumlah SK/Jumlah pelanggaran)	-				4 Orang 1 Dokumen 7 Kegiatan 100 %	35.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	91.410.000,00	
	5.03.02. 2.04.000 1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		35.150.000,00	BKPSDM
	5.03.02. 2.04.000 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															

		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.000,00	BKPSDM
5.03.02. 2.04.000 7	Pembinaan Disiplin ASN														
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					150 Orang	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.560.000,00	BKPSDM
5.03.02. 2.04.000 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					1 Laporan	0,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		13.700.000,00	BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						514.375.000,00							1.945.320.000.000,00	
3	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase pengembangan potensi ASN	-			24,73 %	514.375.000,00						-	1.945.320.000.000,00	

		MANUSIA														
5.04.02. 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-				4100 Orang	45.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	320.000.000,00	
5.04.02. 2.01.000 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					4200 Orang	45.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		320.000.000,00	BKPSDM
5.04.02. 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				50 Orang	469.375.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.945.000.000.000,00	
5.04.02. 2.02.000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	469.375.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	1.945.000.000.000,00	BKPSDM
							5.531.166.581,00						1.950.722.209.068,20	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BKPSDM untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BKPSDM Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BKPSDM itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BKPSDM Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 84,51%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester II terdiri dari Belanja Operasional sebesar 41,12%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 BKPSDM mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp5.659.559.091,00 yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran BKPSDM dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

